

**INVENTARIS ARSIP**  
**BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT**  
**(1945 – 1950)**



**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**1986**

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan pembentukan Komite Nasional di Pusat maupun di daerah-daerah, yang sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan UUD 1945 serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Komite Nasional di Jakarta yaitu Komite Nasional Pusat (KNP), yang kemudian dikenal sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada umumnya Anggota-Anggota KNIP itu terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat, yang berasal dari berbagai daerah atau memegang peranan dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk Anggota-Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan, bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

Pada Sidang II KNP tanggal 16-17 Oktober 1945, menghasilkan perubahan besar dalam kedudukan dan kewajiban KNP, dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X (eks) tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat Wakil Presiden Nomor X tersebut ditetapkan sesuai dengan usul dari KNP, bahwa:

1. Sebelum terbentuk MPR dan DPR, Komite Nasional Pusat disertai Kekuasaan Legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan sehari-hari KNP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara dan bertanggung jawab kepada KNP.

Selama melakukan tugas, BP KNP telah dua kali berpindah tempat kedudukan, yaitu:

- a. Mula-mula di Jakarta, dari bulan Oktober 1945 sampai Maret 1946, dengan Sidang III Komite Nasional Pusat di dalamnya dan Sidang IV di Solo pada akhirnya.
- b. Kemudian di Purworedjo, dari bulan Maret 1946 sampai Maret 1947, yang diakhiri dengan Sidang V Komite Nasional Pusat di Malang.
- c. Terakhir di Jogjakarta, dari bulan Maret 1947 sampai Agustus 1950, dengan Sidang U1 Komite Nasional Pusat pada akhir tahun 1949.

Pengawasan dilakukan pula oleh BP dengan perantara seksi-seksi, yaitu badan perlengkapan SP KNP yang berkewajiban:

1. Memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah dan kesulitan-kesulitannya dalam menjalankan UU dengan memberi bantuan jika perlu.
2. Mendengarkan suara rakyat pada hari-hari tertentu serta memperhatikan surat-surat yang disampaikan kepada Badan Pekerja.
3. Mengadakan penyelesaian atas peristiwa-peristiwa penting.

Dalam menjalankan kewajiban pada nomor 1 yang tersebut di atas, seksi-seksi menjalankan rapat-rapat kerja dengan Menteri-Menteri dari urusan masing-masing seksi tersebut yang meliputi bidang beberapa Kementerian. Dalam rapat kerja itu

dibicarakan hal-hal yang dikemukakan oleh seksi dan seksi-seksi berkesempatan menyampaikan pendapat-pendapat, kritik, ataupun usul-usulnya kepada Menteri yang bersangkutan. Selain dari itu oleh saksi-seksi. diadakan pula penyelidikan atas peristiwa-peristiwa penting atau peninjauan ke daerah-daerah baik oleh rombongan anggota-anggota seksi sendiri maupun dalam rombongan peninjauan dari Pemerintah.

Cara bekerja dan susunan badan-badan perlengkapan BP KNP semakin teratur, setelah pada tanggal 10 Juni 1947 ditetapkan Peraturan Tata Tertib BP KNP.

Peraturan Tata Tertib itu antara lain mengatur cara bekerja BP KNP dalam melakukan tugas membentuk UU (bersama-sama dengan Pemerintah) maupun tugas kontrol atas Pemerintah.

Dalam hubungan dengan cara bekerja itu terdapat ketentuan-ketentuan tentang badan-badan perlengkapan yang membantu BP KNP dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu:

- a. Panitia-Panitia Tetap
- b. Seksi-Seksi
- c. Panitia Rumah Tangga
- d. Panitia Khusus

Pembentukan UU dilakukan oleh BP KNP dengan bantuan Panitia-panitia Tetap atau Panitia Khusus yang dibentuk secara insidental, juga untuk keperluan-keperluan lain daripada perundang-undangan. Panitis-Panitia Tetap berkawajiban mengadakan pemeriksaan persiapan atas RUU. Mengenai pemeriksaan persiapan itu oleh para pelapor dari semua Panitia Tetap bersama-sama (selaku 'Panitia Pelapor') menyusun laporan gabungan yang disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan untuk dijawab secara tertulis (dengan'Memori Jawaban').

Dengan menggunakan laporan gabungan dan memori jawaban Pemerintah sebagai bahan, kemudian Rapat Plena BP KNP merundingkan RUU itu dan selanjutnya mengambil keputusan. Rapat Pleno BP KNP yang merundingkan RUU adalah terbuka. Rapat Pleno tertutup hanya diadakan jika dianggap perlu, atas usul Pemerintah atau 3 orang Anggota BP KNP.

Dalam tugas Pengawasan atas pemerintah, BP KNP mendengar keterangan Pemerintah tentang kebijaksanaan yang akan atau telah dijalankan oleh pemerintah (walaupun tidak diatur dalam latta Tertib). Keterangan Pemerintah itu kemudian diperdebatkan dengan mengadakan Pemandangan Umum, yang selanjutnya dijawab oleh Pemerintah.

### **Sejarah Arsip Badan Pekerja KNIP**

Sekretariat yang membantu Badan Pekerja KNIP dalam periode BP KNIP di Jogjakarta semakin dapat disempurnakan. Tetapi sangat disayangkan, hasil-hasil karya pegawai-pegawai, bahkan seluruh arsip dan segala dokumen serta alat-alat

perlengkapan BP KNIP dari periode sebelum 19 Desember 1948, musnah sama sekali sewaktu pendudukan Belanda di Jogjakarta.

Namun untungnya arsip-arsip dari Badan Pekerja KNIP ini masih ada yang dapat diselamatkan. Hal ini terbukti ketika pada tahun 1973, Sekretariat Kabinet RI menyerahkan koleksi Arsip Kabinet Presiden dan Kabinet Perdana Menteri kepada Arsip Nasional RI. Ketika diadakan pencatatan arsip-arsip Kabinet Presiden periode 1945-1949 oleh pihak Arsip Nasional RI, ditemukan arsip-arsip dari Badan Pekerja KNIP termasuk ditemukan juga antara lain arsip-arsip dari Sekretariat Nagara, Kementerian Penerangan, Kejaksaan, dan lain-lain. Koleksi Arsip BP KNIP yang ditemukan ini tidak teratur dan tidak ada daftar sama sekali. Koleksi arsip ini berjumlah 4 boks atau sepanjang 0,4 meter lari, dengan keadaan fisik yang masih cukup baik.

### **Inventarisasi**

Inventaris Arsip BP KNIP ini disusun dengan tujuan sebagai buku petunjuk bagi penelitian. Untuk tujuan itulah inventarisator berusaha agar inventaris arsip ini dapat memberikan gambaran yang sistematis.

Skema/bagen inventaris arsip ini disusun berdasarkan masalah. Isi dari inventaris ini dilengkapi dengan Lampiran, yang terdiri dari: Bagan Organisasi Sekretariat BP KNIP, daftar arsip yang diusulkan musnah, daftar singkatan, ikhtisar susunan Anggota BP KNIP 1945-1947, daftar Panitia Tetap BP KNIP tahun 1947, daftar nama anggota KNIP, serta Pengumuman-Pengumuman Badan Pekerja KNIP.

Akhirnya Inventaris Arsip BP KNIP ini, dilengkapi pula dengan Indeks yang mengacu ke nomor inventaris.

INVENTARISATOR

## DAFTAR PUSTAKA

Kaesnodipradjo, ed. Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI Tahun 1945. Jakarta: SK Seno, 1951.

. Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI Tahun 1946. Jakarta: SK Seno.

. Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI Tahun 1947. Jakarta: SK Serio.

. Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI Tahun 1948. Jakarta: SK Seno.

.Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI Tahun 1949. Jakarta: SK Seno.

Panitia 20 Tahun Indonesia Merdeka. 20 Tahun Indonesia Merdeka I. Jakarta: 1965.

**INVENTARIS ARSIP BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT**

Nomor	Uraian Deskripsi Arsip	Volume	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu
<b>I.</b>	<b>BADAN</b>			
<b>1</b>	<b>PENGUMUMAN PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA DAN PERATURAN PRESIDEN RI</b>			
1	Pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tentang Penetapan-Penetapan UUD Negara RI, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden , serta Penetapan sebuah Komite Nasional	1 lembar	Salinan	1945
2	Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1946 tentang Penyempurnaan Susunan KNIP.	1 lembar	Salinan dari Salinan	30 Desember 1946
<b>2</b>	<b>BADAN PEKERJA KNIP</b>			
3	Surat Keterangan mengenai Komite Nasional .	1 lembar	Stensilan	± 1947
4	Surat Keterangan mengenai Pekerjaan BP KNIP. Peninggal. Tt. ( ± 1947)	1 lembar		± 1947
5	Pemandangan Umum' Komite Nasional Indonesia Pusat terhadap pekerjaan BP KNP (Kutipan dari surat kabar 'Suara Rakyat'	1 lembar	Salinan	26 Pebruari 1947
6	Teks Pidato Ketua BP KNIP Mr. Assaat mengenai tiga tahun BP KNIP tanggal 16 Oktober 1948	1 lembar	Stensilan	Oktober 1948
7	Rencana Anggaran terhadap mata anggaran 1.8.1.2. (belanja barang) BP KNP Tahun 1949	1 sampul	Peninggal	1948
8	Rancangan Penetapan Panitia Urusan Rumah Tangga BP KNP. Tt. ( ± 1947 ) . NB : Tidak Lengkap	1 sampul	Salinan	± 1947
<b>3</b>	<b>KEANGGOTAAN</b>			
9	Berkes mengenai Kedudukan Hukum Anggota BP KNP.	3 lambar	Peninggal, Tembusan	September-Desember 1947
10	Usul Mr. Sartono Cs. dan Atandemen dari Soebadia Ca.mengenai Kedudukan Anggota KNP atau BP KNP yang keluar dari partainya.	2 lembar	Konsep, Salinan.	Pebruari 1948
11	Daftar ikhtisar mengenai Susunan 80 KNP lengkap denganartal-pertai sejak tahun 1945 sampai tahun 1947. Tt.(1947).	1 lembar	Peninggal	1947
12	Surat Keterangan mengenai Panitia dalam BP KNP.NB: Tidak Lengkap. Tt. ( ± 1947).	1 lembar	Peninggal.	± 1947
13	Daftar nama Panitia Tetap BP KNP. Stensilan. 11 April 1947.	1 lembar	Stensilan	1947-05-11
14	Daftar Anggota BP KRP yang turut menyingkir bersama Pemerintah dengan rombongan terakhir dari Jogjakarta.	1 lembar	Peninggal.	22 Agustus 1947
15	15. Usul dari Anggota-Anggota BP KNP (M. Tamboenan, Soebadio, Tanling Djie, dan Soepeno) mengenai RUU tentang Perubahan UU Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Salinan. 22 Oktober 1946.	1 lembar	Salinan	22 Oktober 1946.
16	Daftar nama, tempat tinggal, partai, dan golongan bangsa Anggota-Anggota KNIP. Peninggal. Tt. ( ± 1947).	1 lembar	Peninggal.	± 1947
<b>4</b>	<b>KEPUTUSAN BADAN PEKERJA KN(1)P</b>			

17	Keputusan BP KNP No. 79/BP3/47 mengenai Pembentukan Panitia Khusus tentang Fonds Kemerdekaan Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Pinjaman Nasional..	1 lembar	Pertinggal.	20 Nopember 1947
18	Keputusan BP KNP No. 81/8P3/47 mengenai Rancangan Anggaran Belanja dan menambah Anggota Panitia Rumah Tangga BP KNP.	1 lembar	Pertinggal.	26 Nopember 1947
19	Keputusan BP KNP No. 82/8P3/47 mengenai Kemungkinan Mutaties dalam BP KNP. Pertinggal. 26 Nopember 1947. 1 lembar	1 lembar	Pertinggal.	26 Nopember 1947
20	Keputusan BP KNP No. 84/BP3/47U mengenai RUU tentang Kedudukan Hukum BP KNP. Pertinggal. 1 Desember 1947.	1 lembar	Pertinggal.	1 Desember 1947
21	Keputusan BP KNP No. 85/BP3/47 mengenai Pembentukan Panitia Mosi-Mosi BP KNP. Pertinggal. 3 Desember 1947.	1 lembar	Pertinggal.	3 Desember 1947
22	Keputusan BP KNP No. 86/BP3/47 dan 87/8P3/47 mengenai pengiriman Anggota BP KNP ke Sumatera. Pertinggal. Desember 1947.	2 lembar	Pertinggal.	Desember 1947.
23	Keputusan BP KNP No. 51/BP3/47 mengenai Quorum Darurat dalam masa genting. Pertinggal. 15 Agustus 1947.	1 lembar	Pertinggal.	15 Agustus 1947
24	Keputusan Sidang BP KNP mengenai Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946 tentang pergantian kekuasaan Pemerintah sepenuhnya oleh Presiden. Pertinggal. 10 Juli 1946.	1 lembar	Pertinggal.	10 Juli 1946
25	Keputusan BP KNP No. 26/BP3/47U mengenai RUU tentang Pembentukan Balai Kota Surakarta. Pertinggal. 18 Mei 1947. 1 lembar	1 lembar	Pertinggal.	18 Mei 1947
26	Keputusan BP KNP No. 27/BP3/47U tentang Perubahan- Perubahan RUU Pemerintah mengenai Pembentukan Balai Kota Jogjakarta, disampaikan kepada Presiden RI di Jogjakarta. Pertinggal. 23 Mei 1947.	1 lembar	Pertinggal.	23 Mei 1947
27	Keputusan BP KNP No. 45/BP3/48U mengenai RUU Pokok tentang Pemerintahan Daerah. Pertinggal. 1 Juli 1948. 1 lembar	1 lembar	Pertinggal.	1 Juli 1948
28	Keputusan BP KNP No. 28/BP3/47U mengenai RUU tentang Penetapan Peraturan Istimewa Pajak Pendapatan terhadap Upah, beserta lampiran. Pertinggal. 22 Mei 1947.	2 lembar	Pertinggal.	22 Mei 1947

29	Keputusan-keputusan BP KNP mengenai Persetujuan BP KNP terhadap Perubahan-Perubahan RUU Pemerintah tentang mengganti UU Nomor 10/46 mengenai Pembawaan Uang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 10 tanggal 29-10-1946, dan Penetapan Peraturan Istimewa Pajak Pendapatan terhadap upah, pada Rapat BP KNP tanggal 22 Mei 1947, disampaikan kepada Presiden RI. Peninggal. 24 Mei 1947.	1 lembar	Peninggal.	24 Mei 1947
30	30 Keputusan BP KNP No. 73/BP.3/47 U. mengenai RUU Hukum Pidana Tentara. Peninggal. Oktober 1947. 1 lembar	1 lembar	Peninggal.	Oktober 1947
31	Keputusan BP KNP No. 80/BP3/47 mengenai usul inisiatif Sdr. Pravoto Mangkoesasmito Cs. mengenai RUU tentang Penambahan UU Keadaan Bahaya.	1 lembar	Peninggal.	21 Nopember 1947
32	Keputusan BP KNP No. 83/BP3/47 mengenai Usul Inisiatif BP KNP terhadap RUU tentang Penambahan UU Keadaan Bahaya.	1 lembar	Peninggal.	25 Nopember 1947
33	Keputusan-keputusan BP KNP (Ikhtisar) pada Sidang IX di Jogjakarta tanggal 19 - 21 Nopember 1947.	1 lembar	Stensilan	Nopember 1947
34	Keputusan BP KNP No. 27/BP3/48U sebagai pengganti Keputusan BP KNP No. 88/BP3/47 (12 Desember 1947) tentang mengikuti Perundingan Indonesia-Belanda.	2 lembar	Peninggal.	14 April 1948.
35	Keputusan Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) BP KNP tanggal 14 April 1948 mengenai Penetapan Anggota-Anggota Panitia Politik Perundingan Indonesia-Belanda.	1 lembar	Peninggal.	15-Apr-48
<b>5. RANCANGAN UNDANG-UNDANG.</b>				
36	RUU Keadaan Bahaya dan RUU tentang Perubahan UU Keadaan Bahaya.	2 lembar	Stensilan	1946
37	RUU dan UU No. 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peadilan Ulangan di Jawa dan Madura.	2 lembar	Peninggal.	21 April-24 Juni 1947
38	RUU dan UU No. 18 Tahun 1947 tentang Penetapan Peraturan Istimewa Pajak Rendapatan terhadap Upah. Peninggal. 12 Juni 1947.	2 lembar	Peninggal.	12 Juni 1947.
39	RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1946 mengenai Kementerian Dalam Negeri dan Kehakiman..	1 lembar	Salinan	25 Oktober 1946
40	RUU Tahun 1947 tentang Daerah Istimewa Jogjakarta. Peninggal. 1947. NB: Tidak Lengkap	1 lembar	Peninggal.	1947
41	RUU tentang Pembentukan Haminte Kota Surakarta. Stensilan.	1 lembar	Stensilan	1947

42	RUU tentang Perubahan Pasal 7 ayat 2 UU Keadaan Bahaya mengenai Peraturan-Peraturan dan Kedudukan Dewan Pertahanan Negara dan RUU tentang Pengesahan Pernyataan Keadaan Bahaya. Tt. (± 1947). NB: Tidak Lengkap	1 lembar	Stensilan	± 1947
43	RUU Kerja Tahun 1947. Stensilan	4 lembar	Stensilan, Petinggal	1947.
44	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-Anggotanya.	1 lembar	Petinggal.	1940
45	RUU tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 1948 mengenai Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, disertai lampiran.	1 lembar	Stensilan	3 Desember 1948.
46	RUU tentang Penimbunan Bahan Makanan Penting.	1 lembar	Stensilan	1945
47	RUU Tahun 1948 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah dalam Negara Republik Indonesia.	1 lembar	Stensilan	1948.
48	RUU tentang Sekolah Lanjutan. Stensilan. Tt. (± 1948).	1 lembar	Stensilan	± 1948
49	RUU tentang Pengawasan Perburuhan.	1 lembar	Petinggal.	1948.
50	RUU tentang mengesahkan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara Kerajaan Mesir tertanggal 21 bulan Rajab 1366H/10 Juni 1947 (Cairo), disampaikan oleh Sekretarian Negara disertai surat pengantar.	1 lembar	Salinan	Januari 1948
<b>6</b>	<b>UNDANG-UNDANG</b>			
51	Undang-Undang Keadaan Bahaya Tahun 1946. Cetakan. 6 Juni 1946.	1 lembar	Cetakan	6 Juni 1946.
52	Undang-Undang No. 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte Kota Surakarta. Tembusan. 5 Juni 1947.	1 lembar	Tembusan	5 Juni 1947
53	Undang-Undang No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte Kota Jogjakarta beserta lampiran. Stensilan. 1947. 1 lembar	1 lembar	Stensilan	1947
54	Undang-Undang No. 18 Tahun 1947 tentang Penetapan Peraturan Istimewa Pajak Pendapatan terhadap Upah. Salinan. 12 Juni 1947.	1 lembar	Salinan	1947
55	Undang-Undang No. 21 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana Di Luar Hadir Terdakwa pada Pengadilan Negeri. Tembusan. 24 Juni 1947.	1 lembar	Tembusan	24 Juni 1947
56	Undang-Undang No. 28 Tahun 1947 tentang Cukai Tembakau II. Salinan. 30 Agustus 1947.	1 lembar	Salinan	30 Agustus 1947
57	Undang-Undang No. 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras. Salinan. 30 Agustus 1947.	1 lembar	Salinan	30 Agustus 1947

58	Undang-Undang No. 30 Tahun 1947 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1947 mengenai Promss Negara.	1 lembar	Salinan	30 Agustus 1947
59	Undang-Undang No. 31 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, jo 31, 6, 9, 11, dan 16.	1 lembar	Tembusan	4 September 1947.
60	Undang-Undang No. 32 Tahun 1947 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah-Sekolah Lanjutan Negeri.	1 lembar	Pertinggal	22-Sep-47
61	Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Penambahan UU Keadaan Bahaya dengan penjelasan.	1 lembar	Tembusan	9 Januari 1948.
62	Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah.	1 lembar	Tembusan	10 Juli 1948
63	Undang - Undang No. 31 Tahun 1948 tentang Naturalisasi Joseph Cornelie De Groot.	1 lembar	Salinan	30 Oktober 1948
64	Daftar Undang-Undang Tahun 1948 (1 Januari - 31 Agustus 1948).	1 lembar	Salinan	1948/09/01
<b>7</b>	<b>PERSIDANGAN</b>			
<b>a</b>	<b>Rencana Kerja</b>			
65	Rencana-Rencana Kerja Badan Pekerja KNP. Pertinggal. Juli-Desember 1947.	4 lembar	Pertinggal	Juli-Desember 1947.
66	Rencana Pekerjaan Bagian Umum di kota Malang mengenai Pengawasan Situasi dalam rangka Sidang KNIP. Tembusan. 1947.	1 lembar	Tembusan	1905/04/30
<b>b</b>	<b>Rancangan dan Daftar Acara Rapat</b>			
67	Rancangan acara rapat-rapat pada Sidang X BP KNP di Jogjakarta, serta daftar nama Panitia-Panitia Khusus dan Seksi-Saksi.	1 lembar	Pertinggal, Stensilan	Desember 1947.
68	Rancangan Acara Rapat Panitia Khusus (Mr. Samsudin) mengenai Peraturan Negara terhadap kedudukan Presiden. Konsep. Tt. (± 1947).	1 lembar	Konsep	± 1947
69	Daftar Acara Rapat-Rapat/Sidang-Sidang BP KNP.	1 sampul	konsep, Stensilan, Perting	1947-1950.
<b>c</b>	<b>Laporan dan Notulen Rapat</b>			
70	Notulen Rapat Seksi Pembangunan (Seksi III). Pertinggal. Juli-Nopember 1947.	4 lembar	Pertinggal	Juli-Nopember 1947.
71	Laporan Rapat seksi I (Luar Negeri) pada tanggal 9-10 Juli 1947 tentang menanyakan kepada Menlu, Menteri, Muda Penetang- an, dil. mengenai perjalanan mereka ke luar negeri. Pertinggal, Juli 1947.	1 lembar	Pertinggal	Juli 1947
72	Laporan Rapat Panitia IV BP KNP mengenai RUU tentang Susunan Acara Pengadilan Tentara. Pertinggal. 12 Agustus 1947.	1 lembar	Pertinggal	12 Agustus 1947
73	Notulen Rapat Seksi Kemasyarakatan (Seksi VI). Pertinggal. September-Des ember 1947.	4 lembar	Pertinggal	September-Des ember 1947

74	Notulen Rapat Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) tanggal 10 Januari 1948 mengenai Perundingan Renville. Peninggal. 1 Lembar Januari 1948.	1 lembar	Peninggal	Januari 1948.
75	Lapcran Rapat Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) mengenai pernyataan-pernyataan masyarakat tentang Persetujuan Renville tanggal 27 Januari 1948. Peninggal. Januari 1948.	1 lembar	Peninggal	Januari 1948.
76	Laporan Rapat Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) tanggal 9 Pebruari 1948 mengenai soal-soal Renville, terutama PLEBISIT soal-soal yang mengenai peblesciet di daerah-daerah pendudukan Belanda. Peninggal. Pebruari 1948.	1 lembar	Peninggal	Pebruari 1948
77	Notulen Rapat Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) pada tanggal 14 April 1948 mengenai penetapan susunan Anggota dari Panitia Perundingan Indonesia-Belanda, usul-usul susunan delegasi RI, dan soal-soal Penerangan dan Kementeriannya. Peninggal. 14 April 1948.	1 lembar	Peninggal	14 April 1948.
78	Laporan Rapat Seksi Luar Negeri/Penerangan dan Panitia Politik BP KNP pada tanggal 12 Juni 1948 mengenai situasi perundingan- perundingan terhadap pihak Belanda. Peninggal. Juni 1948.	1 lembar	Peninggal	Juni 1948.
79	Notulen Rapat Seksi Luar Negeri/Penerangan tanggal 26 Juli 1948 mengenai Laporan Panitia Politik tentang perundingan dengan pih. Belanda.	1 lembar	Peninggal	Juli 1948
80	Notulen Rapat Seksi Luar Negeri/Penerangan dan Panitia Politik BP KNP tanggal 19 Oktober 1948 mengenai Parundingan Indonesia- Belanda.	1 lembar	Peninggal	Oktober 1948.
81	Notulen Rapat Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) tanggal. 16 Pebruari 1948 mengenai cara-cara Seksi-Seksi bekerja selanjutnya berhubung dengan adanya Kabinet Presiden.	1 lembar	Peninggal	Pebruari 1948.
82	Laporan Rapat Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) tanggal 15 Maret 1948 mengenai bahan-bahan untuk menentukan acara Papat BP KNP dalam Sidang XII.	1 lembar	Peninggal	15 Maret 1948.
83	Laporan Rapat Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) tanggal 19 Maret 1948 tentang mempersoalkan bahan-bahan untuk pembicaraan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden tanggal 19 Maret 1948 pukul 16.30.	1 lembar	Peninggal	Maret 1948
84	Laporan Rapat Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) pada tanggal 13 April 1948 mengenai Rencana Pekerjaan Seksi I (Luar Negeri Penerangan) tentang hearings dengan delegasi-delegasi RI. Peninggal. April 1948.	1 lembar	Peninggal	April 1948.

85	Laporan Rapat Seksi Luar Negeri/Penerangan dan Panitia Politik BP KNP tanggal 28 Mei 1948, mengenai instruksi- instruksi politik dari Pemerintah kepada delegasi-delegasi RI. Perteinggal. 28 Mei 1948. 1 lembar	1 lembar	Perteinggal	28 Mei 1948
86	Laporan Rapat Seksi Luar Negeri/Penerangan pada tanggal 10 Mei 1945 mengenai RUU tentang Pemilu, Pemuda, Kemebterian Keuangan, serta Pendidikan dan Pengajaran yang akan dibicara- kan dalam Rapat BP KNP dalam Sidang XV. Perteinggal.	1 lembar	Perteinggal	10 Mei 1948
87	Laporan Rapat bersama deri Seksi Luar Negeri/Panerangan dengan Panitia Politik BP KNP, pada tanggal 25 Mei 1948 tentang membicarakan pekerjaan dari Panitia Politik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan.	1 lembar	Perteinggal	25 Mei 1948
88	Laporan Rapat Seksi Luar Negeri/Penerangan pada tanggal 14 Juni 1948 mengenai bahan-bahan yang akan dibicarakan pada Sidang BP KNP ke XVI. Perteinggal. Juni 1948.	1 lembar	Perteinggal	Juni 1948
89	Laporan Rapat Gabungan Seksi Luar Negeri dan Panitia Politik tanggal 10 Juli 1948 tentang mendengarkan Verlag dari Anggota- Anggota yang mengadakan perjalanan ke daerah pendudukan Gelanda mengenai Perjuangan Kemerdekaan.	1 lembar	Perteinggal	Juli 1948
90	Laporan Rapat Seksi I (Luar Negeri/Penerangan) Bersama Panitia Politik tanggal 22 Juli 1948 mengenai Politik Perwakilan-Perwa- kilan Republik.	1 lembar	Perteinggal	26 Juli 1948
91	Laporan Rapat Gabungan Seksi Luar Negeri/Penerangan dengan Panitia Politik tanggal 24 Juli 1948 mengenai soal-soal Politik.	1 lembar	Perteinggal	Juli 1948
92	92- Notulen Rapat Kerja Seksi Luar Negeri/Penerangan Pemerintah (Kementerian Luar Negeri dan Penerangan) pada tanggal 13 Agustus 1948, mengenai organisasi-organi-sasi Kementerian, UU Persuratkabaran, dan penyiaran- penyiaran dalam dan luar negeri. Perteinggal.	1 lembar	Perteinggal	14 Agustus 1948
93	Notulen Rapat Seksi Luar Negeri/Penerangan BP KNP pada tanggal 12 Agustus 1948 mengenai soal-soal Penerangan. Perteinggal. Agustus 1948.	1 lembar	Perteinggal	Agustus 1948
94	Notulen Rapat Seksi Luar Negeri/Penerangan BP KNP. Perteinggal. Agustus-Nopember 1948.	4 lembar	Perteinggal	Agustus-Nopember 1948
95	Notulen Sidang BP KNP.	6 lembar	Perteinggal	Juli 1947-September 1948.
96	Notulen Rapat Seksi V (Kemasyarakatan) tanggal 13 Desember 1947 mengenai usul-usul untuk Rapat Seksi Kombinasi dengan Pemerintah. Perteinggal. Desember 1947.	1 lembar	Perteinggal	Desember 1947
<b>d</b>	<b>Laporan dan Pemandangan Umum</b>			

97	Laporan Panitia - Panitia BP KNP tentang RUU mengenai penimbunan barang penting dengan lampiran, disertai surat pengantar, disampaikan kepada Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat RI. Peninggal. 3-30 Juli 1948.	5 lembar	Peninggal	3-30 Juli 1948.
98	Laporan Panitia-Panitia BP KNP kepada Menteri Keuangan mengenai RUU Undian Uang Negara, disertai surat pengantar.	2 lembar	Peninggal	23 Oktober 1947
99	Laporan, Gabungan Panitia-Panitia Tetap BP KNP mengenai RUU Pemerintahan tentang menentang barang-barang yang dikenakan bea keluar 30% dari harganya.	1 lembar	Peninggal	21 Maret 1948
100	Laporan Panitia mengenai RUU tentang Perubahan Aturan Bea Materai Tahun 1921.	1 lembar	Stensilan.	15-Apr-48
101	Laporan Gabungan Panitia-Panitia Tetap BP KNP tentang RUU antara lain mengenai Penghapusan Pasal 11a UU Pajak Pendapatan 1932, disertai surat pengantar kepada Menteri Keuangan ad interim di Jogjakarta. NB: Tidak Lengkap	1 lembar	Peninggal	2 Desember 1948
102	Laporan Panitia-Panitia kepada Menteri Perburuhan mengenai Rencana-Rencana UU Perburuhan, disertai surat pengantar.	6 lembar	Peninggal	28 Agustus 1947.
103	Laporan Panitia-Panitia BP KNP mengenai RUU Kerja Tahun 1947.	2 lembar	Stensilan.	1947
104	Laporan Panitia III mengenai RUU tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara.	1 lembar	Peninggal	Agustus 1947.
105	Laporan Gabungan Panitia-Panitia Tetap BP KNP mengenai RUU Pokok Pemerintahan Daerah.	1 lembar	Stensilan.	13-Apr-48
106	Laporan Pertemuan Seksi Luar Negeri/Penerangan dan Panitia Politik dengan Dr. Tjoa Sik In (Anggota Delegasi RI) pada tanggal 11 Oktober 1948, mengenai Perundingan Politik Indonesia dengan Belanda + KTN.	1 lembar	Peninggal	Oktober 1948.
107	Laporan Pertemuan Sekai Luar Negeri dengan para undangan untuk merundingkan pembentukan Institute for International Affairs (Suatu Lembaga atau Perkumpulan yang mempersoalkan Perhubungan Luar Negeri atau masalah-masalah internasional) pada tanggal 20 Nopember 1948.	1 lembar	Peninggal	22 Nopember 1948
108	Laporan mengenai kunjungan Rombongan BP KNP ke Jawa Utara.	1 lembar	Stensilan	12 September 1947.
109	Laporan mengenai Peninjauan Anggota-Anggota BP KNP ke Daerah Kedu dan Banyumas yang belum diduduki Belanda.	1 lembar	Stensilan	Sep-47

110	Laporan mengenai Perjalanan/Peninjauan Anggota-Anggota BP KNP di daerah-daerah Jogjakarta dan Surakarta. Stensilan. 1947.	1 lembar	Stensilan	1947.
111	Laporan-laporan dalam rangka Sidang KNIP.	4 lembar	Pertinggal.	Pebruari 1947.
112	Laporan Singkat selama Sidang KNIP.	1 lembar	Pertinggal	1947.
113	Kawat dari Ajudan PYM Presiden di Jogjakarta kepada Tuan Burcher di Selecta Malang mengenai Tamu-Tamu yang akan 1 lembar, hadir pada Sidang KNIP.	1 lembar	Tembusan	22 April 1947.
114	Pemandangan Umum' BP KNP terhadap Keterangan Pemerintah . NB: Tidak Lengkap	1 lembar	Pertinggal	09 September 1948
<b>e</b>	<b>Pengumuman</b>			
115	Pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengenai soal-soal yang dibicarakan dalam Sidang VIII BP KNP di Purworejo tanggal 22-30 Juni 1946.	1 lembar	Turunan	2 Juli 1946
116	Pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Nomor 32 mengenai pengunduran diri Anggota BP KNP dari Sulawesi Moh. Saad, dan meminta kepada Daerah Sulawesi untuk mengajukan calon pengganti.	1 lembar	Pertinggal	19 Oktober 1946
<b>8</b>	<b>AGAMA DAN HUKUM</b>			
	AGAMA			
117	Surat dari Mahmued Joenoos Anggota DPR Sumatera mengenai usul-usul dan rancangan-rancangan tentang pedidikan agama.	1 lembar	Tembusan	3 Pebruari 1948.
118	Laporan dari Jawatan Agama Kresidenan Surabaya mengenai Peninjauan ke daerah pendudukan Belanda antara lain tentang Konperensi Ulama, disertai surat pengantar.	1 lembar	Tembusan	5 Maret 1948
119	Berkas mengenai Peraturan Perkawinan PUAMI (Perkumpulan Umat Adam Ma'rifat Indonesia).	2 lembar	Konsep, Tembusan	28 Juli dan 22 Agustus 1948.
120	Keputusan Rapat Pleno Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Daerah Jogjakarta tanggal 4 September 1948 tentang mendelegeer kekuasaan mencatat nikah di luar kota dan melatih kaum untuk soal tersebut.	1 lembar	Tembusan	7 September 1948.
	<b>HUKUM</b>			
121	Surat dari, Kementerian. Kemakmuran RI Magelang mengenai penyampaian salinan surat Kantor Besar 'PTE' Jogjakarta tentang cap-cap perniagaan dan pendaftaran cadangan (gedeponeerle Handelsmerken), disertai surat pengantar.	1 lembar	Stensilan	17 maret 1947.
122	Teks mengenai Hakim, Jaksa, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta Pengadilan Tinggi. Tt. NB: Tidak lengkap dan tidak jelas.	1 lembar	Salinan	± 1947

123	Surat dari Anggota Komite Nasional Pusat R. Sarpam (PNI) Wonosobo mengenai penyempurnaan Republik sebagai negara hukum.	1 lembar	Tembusan	23 Maret 1948
<b>9</b>	<b>POLITIK DAN UANG NEGARA</b>			
	<b>POLITIK</b>			
124	Kawat dari Presiden RI kepada Gubernur Sumatera mengenai ketimpangan pemilihan calon Anggota KNIP dari Sumatera.	1 lembar	Tembusan	15 Januari 1947
125	Surat dari Anggota KNIP Blitar (Soehardi) mengenai kawat Residen Kediri mengenai kelakuan politik kolonial oleh pegawai Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto, disertai lampiran.	2 lembar	Tembusan	22 Mei 1947
126	Berkas mengenai masalah-masalah politik Negara RI.	1 bundel	Stensilan	Nopember-Desember 1947
127	Keterangan Pemerintah tentang Politik Pemerintah.	2 lembar	Stensilan	1948
128	Seruan Sarekat Sekerja Persenjataan Indonesia (SSPI) kepada seluruh Anggota Jawatan Persenjataan tentang ajakan agar rekan-rekan se Jawatan dan sebangsa bersatu, disertai surat pengantar.	1 lembar	Tembusan	11 Pebruari 1948
129	Seruan dari Front Democratie Rakyat Daerah Karangmodjo mengenai hasil rapat tanggal 7 Maret 1948, antara lain tentang segera dicabutnya pembatasan hak demokratie (demonstrasi, rapat, dll.)	1 lembar	Tembusan	8 Maret 1948
130	Berkas mengenai Perselisihan antara Surat Kabar 'Patriot' dan Percetakan 'Canisius'.	2 lembar	Tembusan	Sep-48
131	Petikan Surat Keputusan Ketua Delegasi tentang Pembubaran Pan Panitia Penerimaan Delegasi-Delegasi ( PPDD) DI Kaliurang dan Pembentukan bagian Penerimaan Tamu di Sekretariat RI sebagai tugas kewajiban PPDD di Jogjakarta.	1 lembar	Stensilan	5 Desember 1948
132	Surat dari Badan Pekerja Himpunan Serikat Buruh Indonesia mengenai pemilihan dan pencalonan perwakilan buruh untuk Anggota Dewan Perwakilan Sementara RIS, beserta lampiran.	2 lembar	Salinan	23 Desember 1949
	<b>WARGA NEGARA</b>			
133	Surat dari Badan Perwakilan Sementara tahun Sidang 1948 kepada Badan Perwakilan Sementara Negara Indonesia Timur mengenai RUU tentang perubahan dalam kitab UU Warga dan Kitab UU Perniagaan, disertai surat pengantar.	1 lembar	Stensilan	26 Mei 1948
134	Surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri mengenai usul mempertahankan stelsel passief UU Warga Negara Indonesia.	1 lembar	Tembusan	30 Juni 1948
135	Usul-usul Panitia II BP KNP mengenai Perubahan Redaksi UU tentang Pencatatan Jiwa.	1 lembar	Salinan	1948
<b>10</b>	<b>ORGANISASI PEMERINTAHAN DAN HUBUNG AN LUAR NEGERI</b>			
	<b>ORGANISASI PEMERINTAHAN</b>			

136	Maklumat Menteri Pertahanan dan Menteri Pekerjaan Umum tentang menetapkan pemindahan Jawatan Urusan Laut seluruhnya dari kekuasaan Menteri Pertahanan kepada Menteri Pekerjaan Umum.	1 lembar	Salinan	Januari 1947
137	Resolusi Pusat Laskar Buruh Indonesia (Jogjakarta) tentang memohon dan mendesak kepada Pemerintah agar status Organisasi Jawatan Urusan Laut dirubah, disertai surat pengantar. Tembusan. 20 April 1947.	1 lembar	Tembusan	20-Apr-47
138	Surat dari Pusat Laskar Suruh Indonesia Jogjakarta mengenai permintaan perhatian dan sokongan tindakan, agar soal sekitar Jawatan Urusan Laut dapat lekas beres., disertai surat pengantar. 2-4 Mei 1947.	1 lembar		2-4 Mei 1947
139	Surat dari Ketua Seksi V BP KNP (S. Mangoensarkoro) kepada Menteri Dalam Negeri mengenai Jawatan-Jawatan Sosial di daerah-daerah. Konsep.	1 lembar	Konsep	14 Oktober 1947
140	Keterangan Kementerian Perburuhan dan Sosial tentang bagian-bagian dari Direktorat B (Sosial). Tembusan. Tt.(± 1948).	1 lembar	Tembusan	± 1948
141	Surat dari Gunadi dan kawan-kawan dari Jawatan Pelayaran cabang Pacitan kepada Pimpinan Jawatan Pelayaran mengenai Jawatan Pelayaran 8 yang berada di bawah Kementerian Kemakmuran. Tembusan. Desember 1947. NB: Tidak Lengkap.	1 lembar	Tembusan	Desember 1947
142	Nota Jawaban Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan BP KNP mengenai Pemusatan Kementerian Kemakmuran, Kewajiban Jawatan Kehutanan, dan Perekonomian di Jawa. Tt. NB: Tidak Lengkap.	1 lembar	Salinan	Tt. (1947)
143	Keputusan Dewan Perwakilan Sumatera tentang Tata Tertib dan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Sumatera, serta daftar nama Anggota Dewan Perwakilan Sumatera.	1 lembar	Stensilan	1947
144	Surat dari Kepala Kantor Perburuhan Daerah Keresidenan Kedu mengenai usul-usul dan sugesti-sugesti antara lain: tentang dipertahankan berdirinya Kementerian Perburuhan.	1 lembar	Tembusan	18 Maret 1948
145	Catatan mengenai soal-soal organisasi dan administrasi Kementerian Luar Negeri. Konsep. 1948.	1 lembar	Konsep	1948
146	Telegram dari Menteri Dalam Negeri untuk Mr. Harmani (Kantor Perancang Jogjakarta) tentang RUU Kota Jogjakarta dan Surakarta agar dibicarakan dalam Sidang BP KNP yang akan diadakan pada tanggal 10 Mei 1947. Tembusan.	1 lembar	Tembusan	5 Mei 1947.
147	Surat dari Perancang Susunan Pemerintah Daerah Bertanda mengenai pembentukan Balai Kota Jogjakarta dan Surakarta. Tembusan. 5 Mei 1947. NB: Tidak Lengkap.	1 lembar	Tembusan	5 Mei 1947.

148	Surat dari Wakil Sekretaris Negara tentang permintaan persetujuan mengenai RUU tentang Pembentukan Balai Kota Jogjakarta dan Surakarta.	1 lembar	Tembusan	8 Mei 1947.
149	Surat dari Wakil Sekretaris Negara mengenai Pembentukan Balai Kota Jogjakarta. Tembusan. 13 Mei 1947.	1 lembar	Tembusan	13 Mei 1947
150	Surat pembedaan kekelituan pasal 1 dan 15 RUU tentang Pembentukan Balai Kota Jogjakarta, disampaikan kepada Sekretaris Negara. Peninggal.	1 lembar	Peninggal	30 Juni 1947
151	Mosi Tedjosoekmana Cs. tentang Pemerintahan Daerah dan Komisaris Negara.	1 lembar	Stensilan	1947.
152	Surat dari Residen Surakarta kepada Menteri Dalam Negeri mengenai RUU Pembentukan Pemerintahan Daerah. Tindakan.	1 lembar		12 Juni 1948.
153	Laporan Bureau RI bagian Penerangan tentang Keresidenan Bantam pada bulan Januari 1948.	1 jilid	Stensilan	17 Maret 1948.
154	Nota Perubahan RUU Pokok tentang Pemerintah Daerah. Stensilan. 1948.	1 lembar	Stensilan	1948
155	'Ontwikkelings Proces' (Proses Perkembangan) UU No. 3 Tahun 1948 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Salinan. 1948.	1 lembar	Salinan	1948
<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b>				
156	Surat dari Kementerian Penerangan mengenai Constitution of The Federal Peoples Republic of Jugoslavia. Tembusan. 31 Januari 1946. NB: Bahasa Inggris	1 lembar	Tembusan	31 Januari 1946
157	Surat dari Kementerian Luar Negeri Jogjakarta mengenai Four-Fold Rights in Chinese Constitution, disertai surat pengantar. Tembusan. 1948. NB: Bahasa Inggris	1 lembar	Tembusan	1948
158	Berkas mengenai usaha-usaha penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda.	1 Sampul	tinggal, Salinan, Tembu	Agustus 1947 - Mei 1948
<b>11. KEMAKMURAN DAN PEMBANGUNAN</b>				
<b>KEMAKMURAN</b>				
159	Nota BP KNP tentang Perkebunan di Jawa Barat.	1 lembar	Peninggal	Tt. (± 1947)
160	Surat Pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Agung dalam Sidangnya yang ke 18 tanggal 3 Juli 1948 mengenai RUU tentang Penimbunan Barang Penting, disertai surat pengantar.	1 lembar	Salinan	3 Juli 1948
161	Nota Jawaban Pemerintah terhadap Laporan Panitia BP KNP mengenai RUU tentang Penimbunan Barang Penting.	1 lembar	Stensilan	30 Juli 1948
<b>PEMBANGUNAN</b>				
162	Penjelasan Rancangan Pemerintah RI tentang Pembangunan 10 Tahun.	1 lembar	Stensilan	Tt. (± 1947)
163	Teks Pidato Ketua Komite Nasional Pusat mengenai Dua Tahun Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1947.	1 lembar	Peninggal	Agustus 1947

12	<b>EKONOMI DAN KEUANGAN</b>			
	<b>EKONOMI</b>			
164	Surat dari SOBSI cabang Poeroradjo mengenai kesulitan ekonomi yang dialami.	1 lembar	Tembusan	17 Maret 1947
	<b>KEUANGAN</b>			
165	Surat dari Residen Periangan mengenai surat Bupati Bandung mengenai Mosi Badan Perwakilan Rakyat Majalaya yang memutuskan tidak setuju terhadap usul Pemerintah untuk menurunkan Kurs Pinjaman Nasional.	1 lembar	Tembusan	09 April 1947
166	Surat dari Partai Rakyat Indonesia Kesadaran Sinoman Tani (Pari Kesit) mengenai pengajuan usul-usul Pari Kesit tentang memperbaiki upah buruh, memberikan tanah kosong, dan memberikan pengertian kepada rakyat yang ada di perkebunan.	1 lembar	Tembusan	11 April 1947
167	Surat dari SSBD daerah Surakarta mengenai penyampaian penjelasan Mosi SSBD daerah Surakarta tentang menuntut perubahan stesel BRI untuk memberi pinjaman langsung kepada rakyat.	1 lembar	Tembusan	28 April 1947
168	Surat dari Pusat 'Fonds Kemerdekaan Indonesia' tanggal 22 Agustus 1945 sampai 31 Desember 1945, beserta lampiran.	2 lembar	Tembusan	22 Mei 1947
169	Anggaran Keuangan dan Perhitungan Ringkas terhadap Uang keluar Pemerintah Daerah Surakarta dalam tahun berjalan 1947.	2 lembar	Stensilan	1947
170	Surat dari dan untuk Menteri Keuangan mengenai meningkatnya harga barang-barang.	2 lembar	Tembusan	1948
171	Surat dari Panitia Gaji dan Kedudukan Pegawai Negeri tentang penyampaian Rencana Peraturan Gaji Pegawai Negeri (PGP 1948), disertai surat pengantar.	1 lembar	Stensilan	22 Juni 1948
172	Surat dari Pimpinan Keuangan TNI bagian Masyarakat mengenai uang Belanja Barang (Ongkos Kantor) TNI bagian Masyarakat.	1 lembar	Tembusan	1948
173	Resolusi Kongres Serikat Buruh Pegadaian, disertai surat pengantar dari Pengurus Besar Serekat Buruh Pegadaian.	1 lembar	Tembusan	08-Apr-47
174	Mosi Sarekat Sekerja Djapen Kabupaten Klaten tentang Pajak Upah dan Studieverlaf bagi buruh.	1 lembar	Salinan	9 Maret 1948
175	Mosi Halim Cs. Tentang Keadaan Deviezen Negara.	1 lembar	Stensilan	12 Desember 1947
<b>13</b>	<b>PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN</b>			
176	Surat kepada Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan mengenai Panitia Sekolah Menengah, Tinggi, Perancang UU Pokok.	1 lembar	Pertinggal	27-Sep-47
177	Surat dari Prasad ja mengenai permintaan pemberian peringatan kepada Kantor Kementerian Pengajaran-bagian F. Tembusan.	1 lembar	Tembusan	1 Maret 1948
178	Surat dari Panitia G8' Jogjakarta mengenai tuntutan kenaikan tingkatan (Kedudukan) guru-guru SR 6 dari RIII ke RI.	1 lembar	Tembusan	21 Pebruari 1948

179	Mosi Pengurus Besar PGRI mengenai Pendidikan dan Pengajaran di daerah pendudukan Belanda, disertai surat pengantar. Tembusan. 29 Pebruari 1948.	1 lembar	Tembusan	29 Pebruari 1948.
180	Mosi Mangoensarkoro Cs. tentang Pengajaran. Stensilan. Tt.	1 lembar	Stensilan	(± 1947).
181	Mosi Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) hasil Kongres II PWKI tentang secepat mungkin diadakan kewajiban belajar bagi kanak-kanak 8-16 tahun. Tembusan. 15 April 1948.	1 lembar	Stensilan	15-Apr-48
182	Seruan Pusat Kebudayaan Kedu Magelang tentang menyambut Kongres Kebudayaan Indonesia. Cetakan. 17 April 1948.	1 lembar	Cetakan	17 April 1948.
<b>14</b>	<b>SOSIAL DAN PERBURUHAN</b>			
	<b>SOSIAL</b>			
183	183. Surat dari Kementerian Sosial kepada Deuan Menteri mengenai pidato Menteri Sosial dalam Sidang BP KNP pada tanggal 29 Nopember 1947, sebagai Jawaban Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan Anggota BP KNP dalam Pemandangan Umum giliran II, disertai surat pengantar.	1 lembar	Tembusan	6 Desember 1947
	<b>PERBURUHAN</b>			
184	Surat dari Pusat Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (Kementerian Negara Urusan Makaman) mengenai jaminan bahan makanan untuk pengungsi buruh, disertai surat pengantar. Tembusan. 22 September 1948.	1 lembar	Tembusan	22-Sep-48
185	Surat dari Jawatan Sosial Propinsi bagian Perburuhan Jawa Barat tentang Buruh-Buruh Jawa yang bekerja di Sumatera (Kaadaan Perburuhan di Sumatera). disertai surat pengantar. Tembusan. 2 April 1947.	1 lembar	Tembusan	02-Apr-47
186	Surat dari Jawatan Sosial Propinsi Bagian Perburuhan Jawa Barat mengenai Mosi PGRI Cabang Kuningan Cirebon. Tembusan. 8 April 1947.	1 lembar	Tembusan	08-Apr-47
187	Surat dari Jawatan Sosial Propinsi bagian Perburuhan Jawa Barat tentang Perburuhan berhubung dengan pasal 14 Naskah Persetujuan Linggarjati. Tembusan. 5 Mei 1947.	1 lembar	Tembusan	5 Mei 1947
188	Resolusi Laskar Buruh Indonesia tentang menentukan sikap terhadap Naskah Persetujuan Linggarjati terutama yang berkenaan dengan pasal 14, disertai Surat Pengantar.	1 lembar	Tembusan	12 Mei 1947
189	Surat dari Kementerian Perburuhan Jogjakarta tentang Note Perubahan dan Tambahan dalam RUU Kerja Tahun 1947, disertai lampiran dan surat pengantar	1 lembar	Tembusan	21 Agustus 1947
	<b>PERTAHANAN &amp; KEAMANAN DAN PERHUBUNGAN</b>			
	<b>PERTAHANAN &amp; KEAMANAN</b>			
190	Laporan Kementerian Pertahanan Urusan ALRI bagian C Jawa Timur mengenai penjagaan keamanan kota Malang berhubung dengan adanya Rapat KNIP, disertai surat pengantar. Tembusan. 7 Maret 1947.	1 lembar	Tembusan	7 Maret 1947

191	Surat dari Dewan Pertahanan Negara dan surat dari Kemaman-berian Pertahanan kepada Sekretaris Dewan Pertahanan Negara, mangensi Fonds Perjuangan Pemuda, beserta lampiran, disertai surat pengantar. Tembusan. Maret 1947.	2 lembar	Tembusan	Maret 1947
192	Keputusan Kepala Jawatan Kepolisian Negara No. Pol. 20/2/47 tanggal 4 Mei 1947 tentang Peraturan Akademi Polisi. Tembusan. 1 Juni 1947.	1 lembar	Tembusan	1 Juni 1947
193	Surat dari Seksi V BP KNP kepada Menteri Pertahanan mengenai instruksi-instruksi pendidikan tentara, plan, dan daftar murid & stafpengajar. Konsep. 14 Oktober 1947. 1 lembar	1 lembar	Konsep	14 Oktober 1947
194	Daftar jumlah tentara dengan pangkat masing-masing dan			
195	Surat dari Dewan Pertahanan Negara mengenai RUU merubah UU Keadaan Bahaya. Tembusan. 19 Januari 1948.	1 lembar	Tembusan	19 Januari 1948
196	Surat dari Pengurus Besar Serikat Buruh Kereta Api kepada Wakil Presiden tentang Insiden Tentara dengan Buruh Kerets Api, beserta lampiran. Tembusan. 27 Pebruari 1948.	1 lembar	Tembusan	27 Pebruari 1948
197	Buku Penerangan Bureau Republik Indonesia di Jakarta tentang Perjanian Geneva (Nasib orang-orang luka dan sakit pada balatentara di Medan Perang) tanggal 27 Juli 1929. Stensilan. 20 Maret 1948.	1 Jilid	Stensilan	20 Maret 1948.
198	Laporan Kementerian Pertahanan Jogjakarta kepada Seksi Pertahanan BP KNP. Asli. 31 Maret 1948.	1 lembar	Asli	31 Maret 1948
199	Laporan Kementerian Pertahanan mengenai Reorganisasi Angkatan Perang	1 lembar	Tembusan	08 April 1948
200	Surat Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6 tentang Penjagaan Bahaya Udara (Informasi dari 'Antara'). Salinan. Tt. (± 1948).	1 lembar	Salinan	(± 1948)
201	Usul Prawoto Mangkoesasmito dan Usul-Usul Inisiatif BP KNP mengenai RUU tentang Penambahan UU Keadaan Bahaya tahun 1947. Stensilan. 1947.	1 lembar	Stensilan	1947
202	Surat Pengantar dari, Staf Umum Markas Besar Tentara tentang penyampaian antara lain: 1 Eksemplar Peraturan Umum dalam Persetujuan Gencatan Senjata dan Pidato Radio Panglima Besar Angkatan Perang RI. Asli. 20 Januari 1948. NB: Isinya tidak ada.	1 lembar	Asli	20 Januari 1948
203	Resolusi Wanita Internasional tentang tidak menyetujui Pengumuman Bersama Gubernur Militer dan Dewan Pertahanan Daerah tanggal 17 Pebruari 1948, pada peringatan Hari Wanita Internasional. Tembusan. 8 Maret 1948.	1 lembar	Tembusan	8 Maret 1948
	<b>PERHUBUNGAN</b>			

204	Surat dari AMKA (Angkatan Muda Kereta Api) cabang Barat mengenai desakan kepada Pemerintah agar PT 'KEST' diganti, supaya situasi di eksplotasi Barat dapat dijernihkan kembali,			
205	Keputusan Kementerian Pertahanan Jogjakarta tentang Pendirian Badan Sipil Resmi Jawatan Urusan Laut Seluruh Indonesia. Tembusan. 5 April 1946.	1 lembar	Tembusan	05 April 1946
206	Peraturan Menteri Kemakmuran No. 2 tentang Penetapan Harga, beserta lampiran. Tembusan. 18 Oktober 1946.	1 lembar	Tembusan	18 Oktober 1946
207	Peraturan Menteri Kemakmuran No. 7 tentang Penetapan Pelabuhan. Tembusan. 6 Desember 1946.	1 lembar	Tembusan	6 Desember 1946
208	Peraturan Menteri Kemakmuran No. 8 tentang Pegawai- Pegawai yang mengusut pelanggaran eksport dan import. Tembusan. 6 Desember 1946.	1 lembar	Tembusan	6 Desember 1946
209	Peraturan Kementerian Kemakmuran No. 9 tentang Penetapan Barang Penting. Tembusan. 6 Desember 1946.	1 lembar	Tembusan	6 Desember 1946
210	Peraturan Menteri Kemakmuran No. 11 tentang Pemusat.an Lapangan Perekonomian pada Kementerian Kemakmuran. Salinan. 1 April 1947.	1 lembar	Salinan	1 April 1947
211	Peraturan Menteri Kemakmuran No. 12 tentang Penetapan Harga Barang-Barang. Tembusan. 5 April 1947.	1 lembar	Tembusan	5 April 1947
212	Peraturan Menteri Kemakmuran No. 13 tentang Penetapan Barang-Barang Penting. Tembusan. 23 Mei 1947.	1 lembar	Tembusan	23 Mei 1947
213	Peraturan Menteri Kemakmuran No. 15 tentang Menambah Peraturan Penimbunan Barang. Tembusan. 15 Juni 1947.	1 lembar	Tembusan	15 Juni 1947
214	Peraturan Kementerian Kemakmuran No. 1 tahun 1948 tentang Pengawasan Pengeluaran Gula dari Daerah Kekuasaan 1 lembar Republik Indonesia. Stensilan. 27 Pebruari 1948.	1 lembar	Stensilan	27 Pebruari 1948
215	215. Peraturan Kementerian Kemakmuran No. 2 tahun 1948 tentang Pembatasan Pengiriman Gula Pasir, disertai surat pengantar dari Kementerian Kemakmuran. Stensilan. 27 Agustus 1948. 1 lembar	1 lembar	Stensilan	27 Agustus 1948
216	Peraturan Kementerian tentang Penetapan Barang-Barang Penting	1 lembar	Tembusan	22 September 1948
217	Peraturan Menteri Keuangan No. 12 tahun 1947 tentang Pemberian Tunjangan Keluarga dan Pemberian Tunjangan Kemahalan	1 lembar	Tembusan	25 Oktober 1947
218	Instruksi Umum dari Kementerian Pengajaran tentang Dasar Pendidikan, maksud dan tujuan Pengajaran	1 lembar	Salinan	1945
219	Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 882/A	1 lembar	Stensilan	18 Januari 1948
220	Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 1532/A	1 lembar	Stensilan	26 Pebruari 1948

221	Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 1917/E , disertai surat pengantar dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.	1 lembar	Stensilan	27 Pebruari 1948
222	Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 2097/A	1 lembar	Stensilan	3 Maret 1948
223	Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 1929/B	1 lembar	Stensilan	3 Maret 1948
224	Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 2128/C tentang Peraturan Umum mengenai Ujian Membaca dan Menulis dengan huruf latin (Ujian PBH)	1 lembar	Stensilan	8 Maret 1948
225	Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 2129/C mengenai Peraturan Khusus tentang Ujian PBH tahun 1948	1 lembar	Stensilan	8 Maret 1948
226	Ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 3096/B .	1 lembar	Stensilan	16 April 1948
227	tidak terbaca			
228	Ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 3287/C .	1 lembar	Stensilan	19 April 1948
229	Ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 9616/C .	1 lembar	Stensilan	6 Nopember 1948
230	Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Kementerian.	1 lembar	Stensilan	5 Maret 1948
231	Penetapan Menteri Sosial No. 5 / 15 / 9 tentang Urusan Perburuhan.	1 lembar	Stensilan	19 Juni 1947
232	Keputusan Menteri Perburuhan dan Sosial No. 205 / P.U/b mengenai Pembentukan Panitia Penyelidik Jaminan Sosial bagi buruh	1 lembar	Tembusan	25 Pebruari 1948
233	Daftar Keputusan Menteri Agama RI tentang mendirikan sebuah Panitia Pembantu yang berkewajiban menyelidiki sampai dimana Hukum Agama Islam dapat dipakai sebagai Peraturan Negara	1 lembar	Kutipan	30 Agustus 1948
234	Keputusan Menteri Kesehatan No. 628 /Peg/ M tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tertanggal 18 Desember 1947 No. 3557/Peg/M.	1 lembar	Tembusan	3 Maret 1948
235	Keputusan Menteri Perhubungan No. 1/K.A/47 tentang membentuk Badan Pembantu Jawatan Kereta Api RI (BPDKA) dan menetapkan Peraturan BPDKA, disertai surat pengantar dari Kementerian Perhubungan.	1 lembar	Tembusan	31 Mei 1947
236	Surat Edaran dari Kepala Bagian Kriminil Kementerian Kehakiman kepada Para Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti UU , disertai surat pengantar.	1 lembar	Tembusan	12 Nopember 1948
11	<b>SEKRETARIAT BADAN PEKERJA KN(I) P</b>			
237	Bagan/ Skema susunan baru Sekretariat dan formasi BP KNP yang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga pada tanggal 24 Desember 1947.	1 lembar	Pertinggal	Desember 1947
238	Pengumuman Sekretariat BP KNP No. 18/1948 mengenai Rapat - Rapat Terbuka BP KNP.	1 lembar	Pertinggal	24 Nopember 1948

239	Daftar penghasilan dari beberapa pegawai Sekretariat BP KNP.	1 lembar	Pertinggal	1947
240	Anggaran Dasar Serikat Buruh KNIP dan Susunan Pengurus Serikat Buruh KNIP, serta surat pengantar.	1 lembar	Konsep	Januari 1948
241	Daftar surat dari Kantor-Kantor Pemerintah, lengkap dengan tanggal, nomor surat, dan ringkasan isi surat.	1 lembar	Konsep	Januari-September 1947
	<b>DAFTAR ARSIP YANG DIUSULKAN MUSNAH</b>			
1	Surat Pemberitahuan kepada Perdana Menteri. HI mengenai akan diadakannya Rapat BP KNP tentang kedudukan hukum anggota-anggota BP KNP di dalam rapat terbuka pada tanggal 20 Nopember 1947. Pertinggal, 17 Nopember 1947	1 lembar	Pertinggal	17 Nopember 1947
2	Surat dari Arpani kepada Menteri Kemakmuran RI mengenai permohonan untuk dapat bekerja di Palembang dalam lapangan Perdagangan dan Industri dari Kementerian Kemakmuran RI. Tembusan. 1 Desember 1947. 1 lembar	1 lembar	Tembusan	1 Desember 1947
3	Surat dari A. Latif kepada Inspektur Kesehatan Bagian Obat-obatan mengenai mohon diperkenankan membuka kembali Apotik "Priangan" di Jogjakarta. Tembusan. 13 Maret 1948.	1 lembar	Tembusan	13 Maret 1948
4	Surat Undangan Rapat dari Sekretariat Deuan Menteri mengenai akan diadakan Rapat antara Sekretaris-Sekretaris Jenderal dari semua Kementerian. Asli. 7 September 1949.	1 lembar	Asli	7 September 1949.
	<b>PERATURAN/PENETAPAN PEMERINTAH</b>			
5	Penetapan Pemerintah No. 2/OP Tahun 1945 tentang Pembentukan Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri. Tembusan.	1 lembar	Tembusan	1945
6	Penetapan Pemerintah No. 4 &ahun 1947 tentang Pemungutan bea dan buhai pada lapangan terbang Maguus (Jogjakarta), Maospati (Madiun), dan Surakarta. Salinan. 5 November 1947.	1 lembar	Salinan	05-Nov-47
7	Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947 tentang Pemberian Tunjangan kepada Bekas Pegawai serta Janda dan Anak Piatu- nya. Tembusan. 10 Juli 1947.	1 lembar	Tembusan	10 Juli 1947
8	Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1947 tentang menyelenggarakan Rumah Negeri untuk para Menteri RI, beserta surat pengantar dari Sekretaris Negara. Tembusan. 1947.	1 lembar	Tembusan	1947
9	Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1947 tentang Peraturan Sumpah Jabatan Pegawai Polisi. Tembusan. 4 September 1947.	1 lembar	Tembusan	1947
10	Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1948 tentang Perantaraan Bank-Bank Pemerintah dalam peredaran uang berhubung dengan adanya uang palsu. Tembusan. 1948. NB: Tidak Lengkap	1 lembar	Tembusan	1948
11	Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1948 tentang Militeri- 1 lembar sasi beberapa perusahaan di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Tembusan. 22 Oktober 1948.	1 lembar	Tembusan	22 Oktober 1948

12	Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1948 tentang militerisasi Perusahaan-Perusahaan Percetakan yang berada dibawah Pengawasan Pemerintah. Tembusan. 23 Oktober 1948.	1 lembar	Tembusan	23 Oktober 1948
13	Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1948 tentang kekuasaan Komandan Sub Teritorium dan Kepala Daerah Karesidenan/ Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta. Tembusan. 26 Nopember 1948	1 lembar	Tembusan	26 Nopember 1948
14	Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1949 tentang Penghasilan. Pegawai Negeri yang tidak atas kemauan sendiri untuk sementara waktu diperhentikan dengan hormat dari pekerjaannya. Tembusan. 30 September 1949.	1 lembar	Tembusan	30 September 1949